

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

4.1. Deskripsi Provinsi Sumatera Utara

4.1.1. Sejarah Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara tahun 2010 sejarah terbentuknya Provinsi Sumatera Utara bermula pada masa lalu di masa jaman penjajahan, Pemerintahan Belanda menamakan daerah Sumatera dengan sebutan *Gouvernement van Sumatera* yang dipimpin seorang *Gouverneur* berkantor di Medan. Wilayah teritorial *Gouvernement van Sumatera* meliputi seluruh Sumatera. Di masa awal kemerdekaan Indonesia struktur kekuasaan *Gouvernement van Sumatera* diubah menjadi Pemerintahan Sumatera yang dijabat oleh seorang Gubernur. Perbedaan yang paling mendasar di masa ini ialah Provinsi Sumatera terbagi ke beberapa wilayah teritorial (daerah-daerah administratif keresidenan) yang di pimpin oleh seorang Residen (BPS, 2010: lxxv).

Permana (2017) dalam bagian disertasinya mencatat pada pertengahan abad ke 19 di Provinsi Sumatera Utara terjadi penjajahan kolonial, perbudakan di perkebunan dan migrasi yang berakibat pada ketegangan etnis. Pada sisilain penyebaran agama berlangsung di saat yang sama proses ini sangat kuat berlangsung di Wilayah Tapanuli bagian Selatan dengan pengaruh nilai Islam dan Tapanuli bagian Tengah dengan pengaruh nilai Kriseten. Ini sekaligus turut memunculkan ketegangan di masa lalu pada arena etno-relegius. Pada abad ini

terjadi perang Batak melawan Penjajah dan perang Paderi yang berlangsung sekitar tahun 1824 dan 1833. Sementara pada bagian Timur dari Sumatera Utara dijadikan lahan perkebunan untuk sumber ekonomi bagi Belanda (Permana, 2017: 72-73).

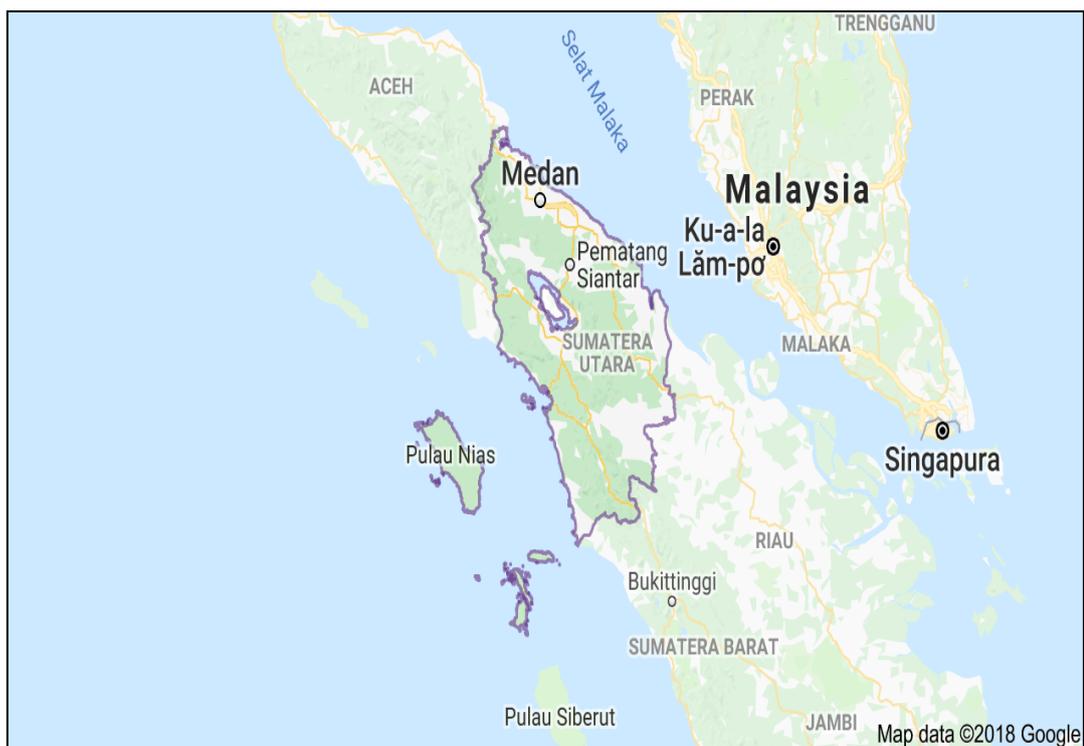
4.1.2. Kondisi Geografis dan Demografi Penduduk

Letak geografis Provinsi Sumut berada pada garis $1^{\circ} - 4^{\circ}$ Lintang Utara dan $98^{\circ} - 100^{\circ}$ Bujur Timur. Secara topografi posisi Provinsi Sumut berbatasan dengan Provinsi Nangroe Aceh Daerusalem di sebelah Utara, di sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Barat (BPS, 2015: 5). Ibu Kota Provinsi Sumut ialah Kota Medan, Provinsi Sumut memiliki 25 Kabupaten dan 8 Kota dengan total keseluruhan Kecamatan sejumlah 440 Kecamatan dan 6008 Desa di tahun 2014 (BPS, 2015: 23). Provinsi Sumut dikenal juga sebagai Provinsi yang memiliki jumlah perkebunan yang cukup luas, hal ini dikarenakan luas wilayah daratan Provinsi Sumut seluas $72.981,23 \text{ km}^2$. Data BPS tahun 2015 menunjukkan perkebunan terbesar di Provinsi Sumut berada di Kabupaten Langkat dengan luas $6.262,00 \text{ km}^2$ atau diperkirakan setara dengan $8,58 \%$ dari luas Provinsi Sumut. Perkebunan terbesar selanjutnya berada di Kabupaten Mandailing Natal dengan luas $6.134,00 \text{ km}^2$ atau $8,40 \%$ kemudian Kabupaten Tapanuli Selatan dengan luas $6.030,47 \text{ km}^2$ atau $8,26 \%$ (BPS Provinsi Sumut, 2015: 5).

Demografi penduduk Provinsi Sumut secara nasional berada pada posisi ke empat sebagai Provinsi dengan jumlah penduduk terbesar setelah Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Berdasarkan hasil sensus penduduk di tahun 2010

jumlah penduduk di Provinsi Sumut sejumlah 12.982.204 jiwa (BPS RI, 2014: 166) kemudian pada tahun 2014 mengalami peningkatan menjadi 13.766.851 jiwa yang tersebar diberbagai daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumut (BPS Provinsi Sumut, 2015: 41).

Gambar: 4.1. Peta Provinsi Sumatera Utara



Sumber: Google Maps. Link:

<https://www.google.com/maps/place/Sumatera+Utara/data=!4m2!3m1!1s0x2fd7f95aeb721c87:0xaca73e8109d7cb0b?sa=X&ved=2ahUKEwi83dWbgPzcAhUGTn0KHSqWDT4Q8gEwAHoECAUQAQ>. Akses 20 Agustus 2018.

Gambar peta di atas memperlihatkan daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai Provinsi yang berada di tengah-tengah antara Provinsi NAD dan Provinsi Sumatera Barat. Selain itu juga dari perairan laut Provinsi Sumatera Utara dapat di akses pelayaran kapal menuju Malaysia. Kondisi ini sekaligus turut

meningkatkan mobilitas interaksi sosial ekonomi masyarakat di daerah Provinsi Sumatera Utara.

4.1.3. Kondisi Sosial Budaya dan Ekonomi

Kehidupan sosial budaya masyarakat di Provinsi Sumut banyak dipengaruhi dari nilai-nilai budaya yang melekat di setiap etnis. Sebaran populasi penduduk berdasarkan etnis menurut data sensus penduduk tahun 2010 yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik memperlihatkan jumlah masyarakat dengan etnis terbesar ditempati etnis Batak dengan jumlah 5.785.716 jiwa (sekitar 43,4 %), kemudian disusul dengan etnis Jawa berjumlah 4.319.719 jiwa (sekitar 32,4%), etnis Melayu berjumlah 771.668 jiwa (sekitar 5,7%), etnis Tionghoa berjumlah 340.320 (sekitar 2,55 %) dan masih terdapat etnis lainnya (BPS RI, 2011: 36-41).

Kehidupan bermasyarakat antar etnis di Provinsi Sumut secara umum berjalan secara harmonis. Harmonisasi tersebut juga berjalan bersamaan dengan kehidupan beragama. Data sensus penduduk tahun 2010 menunjukkan jumlah pemeluk agama Islam sejumlah 8.579.830 (sekitar 66,09%), Kriseten 3.509.700 (sekitar 27,03%), Katolik 516.037(sekitar 3,97%), Hindu 14.644 (0,11%), Budha 303.548 (sekitar 2,34%) dan Konghucu 984 (sekitar 0,01%) (BPS RI, 2011: 42-45). Kehidupan demografi sosial dan agama yang heterogen mampu menghasilkan tatanan kehidupan yang seimbang dibawah naungan sikap saling toleransi. Meski terdapat populasi etnis dan agama yang dominan jumlahnya

namun setiap etnis dan agama dalam eksistensinya mendapat ruang gerak yang luas sehingga tidak terjadi benturan antar etnis dan agama di Provinsi Sumut.

Nilai budaya yang melekat kuat di kalangan etnis Batak menurut Bruner (1961) dikarenakan 5 faktor yaitu: 1) masyarakat Batak yang migrasi ke daerah perkotaan membawa nilai-nilai budaya dari desa ke kota secara utuh 2) sistem budaya (adat) mampu mengikat solidaritas persaudaraan diantara mereka meski berbeda agama. 3) sistem sosial kekerabatan yang dipelihara masyarakat Batak perkotaan dengan kekerabatan mereka di desa. 4) Masyarakat Batak perkotaan memahami adat sebagai basis tatanan moral yang baik dalam masyarakat mereka. 5) identifikasi setiap etnis Batak sebagai kerabat dekat (Bruner, 1961: 519-520). Selain sifat solidaritas yang melekat karena basis sosial budaya dalam pemahaman etnis Batak setiap orang terikat dengan sesuatu yang tidak terlihat di dalam tubuhnya atau dengan istilah lokal disebut dengan *tondi*. Padersen (1967) dalam bagian disertasinya menggambarkan *tondi* sebagai objek dalam tubuh manusia seperti roh yang memiliki aktivitas tersendiri (Padersen, 1967: 19-20). Pemahaman ini juga membuat rasa saling menghormati dan mengayomi diantara mereka semakin kuat.

Selain potret sosial budaya etnis Batak yang mewarnai kehidupan sosial di Provinsi Sumut pada sisi lain terdapat nilai sosial budaya dari etnis Jawa yang tumbuh dan berkembang sebagaimana juga berlaku bagi etnis lainnya. Kehidupan masyarakat etnis Jawa di Provinsi Sumut turut dipengaruhi dengan nilai-nilai sosial budaya Jawa yang menitikberatkan pada pemahaman dan perilaku yang saling menghormati dan mengayomi. Siyo, Soekirman, dan Purwadi, (2008)

mencatat kedatangan etnis Jawa masuk ke Provinsi Sumut bermula ketika masa penjajahan Belanda di tahun 1890-1920 yang berupaya membangun perkebunan tembakau di daerah Sumatera Timur dan menggunakan tenaga kuli kontrak dari Jawa dan Tionghoa (Siyu, Soekirman, dan Purwadi, 2008: 74). Kehidupan interaksi sosial antar etnis yang ada di Provinsi Sumut berjalan secara harmonis tanpa ada ketegangan sosial.

Kehidupan sosial politik masyarakat Provinsi Sumut memiliki sikap terbuka mengingat demografi etnis yang heterogen (plural dan multietnis). Dalam kehidupan politik keterbukaan tersebut tampak jelas dari sejumlah Pilkada yang berlangsung pasca reformasi diisi dengan kandidat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang berasal dari multi etnis sebagai contoh pada Pilkada Provinsi Sumut tahun 2008 Permana (2017: 124) dalam bagian disertasinya mencatat pembelahan kandidat berdasarkan etnis diperoleh hasil pada nomor urut 1 Ali Umri (etnis Melayu) berpasangan dengan Maratua Simanjuntak (etnis Batak, nomor urut 2 Tri Tamtomo (etnis Jawa) berpasangan dengan Benny Pasaribu (etnis Batak), nomor urut 3 R.E. Siahaan (etnis Batak) berpasangan dengan Suherdi (etnis Jawa), nomor urut 4 Abdul Wahab Dalimunthe (etnis Batak) berpasangan dengan R.M. Syafi'I (etnis Jawa), nomor urut 5 Syamsul Arifin (etnis Melayu) berpasangan dengan Gatot Pujo Nugroho (etnis Jawa).

Pada Pilkada Kota Medan tahun 2010 yang berlangsung dua putaran menghadirkan dua pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang salah satu pasangan calon Walikota tersebut merupakan etnis Tionghoa yaitu Sofyan Tan. Keragaman etnis dipahami masyarakat Provinsi Sumut sebagai suatu kelajiman

dalam kehidupan. Sikap keterbukaan ini pada akhirnya berfungsi untuk meredam potensi konflik sosial dan bahkan konflik bernuansa politik.

Kondisi sosial ekonomi di Provinsi Sumut dalam catatan data BPS yang dipublikasi tahun 2015 pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumut secara keseluruhan di tahun 2014 sebesar 5,23 persen jumlah ini mengalami penurunan bila dibandingkan data pada tahun 2013 yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumut sebesar 6,08 persen. Dari sudut anggaran pendapatan Provinsi Sumut di tahun 2014 sebesar Rp. 8,49 Triliun yang terbagi kedalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dari pendapatan daerah lain-lain yang sah. Sementara dari sisi anggaran belanja di tahun 2014 sebesar Rp. 8,53 Triliun yang terbagi kedalam jenis belanja langsung dan belanja tidak langsung. Terdapat 1,68 Triliun untuk belanja bagi hasil kepada Provinsi, Kabupaten, Kota dan Pemerintah Desa (BPS, 2015: 429). Kondisi ekonomi masyarakat Provinsi Sumut dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di tahun 2014 sebesar Rp. 523,77 Triliun. Sektor utama yang menopang PDRB ialah pertanian, kehutanan dan perikanan. Sektor lainnya berasal dari industri pengolahan, perdagangan besar/eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (BPS, 2015: 523).

4.1.4. Kondisi Politik di DPRD Provinsi Sumatera Utara Pada Pemilu di Era Pasca-Orde Baru

Pemilihan anggota DPRD Provinsi Sumut pada empat Pemilu di era pasca-Orde Baru menghasilkan pergeseran kekuatan politik di lembaga DPRD Provinsi Sumut yang tampak melalui perolehan jumlah kursi setiap partai. Bahkan sebagai

konsekuensi dari persyaratan pendaftaran partai di tingkat nasional terdapat partai yang tidak lolos verifikasi partai oleh KPU sehingga terjadi pengurangan peserta Pemilu di setiap Pemilu.

Pemilu tahun 1999 menghadirkan 48 partai politik sebagai peserta Pemilu. Pada tingkat Provinsi Sumut tersedia 80 kursi di DPRD Provinsi. Hasil Pemilu di tahun ini menempatkan 14 partai politik mendapat kursi di DPRD Provinsi di tambah dengan fraksi utusan golongan ABRI. Peringkat tertinggi dari 14 partai politik yang memperoleh kursi di DPRD Provinsi Sumut ditempati PDIP dengan mendapat 28 kursi, Golkar 17 kursi, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendapat 8 kursi, PAN mendapat 7 kursi, Partai Demokrasi Kasih Bangsa mendapat 2 kursi, dan partai politik lainnya masing masing mendapat 1 kursi (Partai Keadilan dan Persatuan, Partai Keadilan, Partai Bulan Bintang, Partai Buruh Nasional, PKB, Partai Katolik Demokrat, Partai Kristen Nasional, Partai Cinta Damai, Partai Nasional Indonesia-Front Marhaenis) kemudian terdapat 9 kursi untuk utusan golongan ABRI (KPU Provinsi Sumatera Utara, 1999).

Pemilu tahun 2004 diikuti 24 partai politik sebagai peserta Pemilu. Pada konteks Provinsi Sumut dalam pemilihan anggota DPRD Provinsi terdapat 14 partai politik yang berhasil memperoleh kursi di DPRD Provinsi Sumut dari 85 kursi yang tersedia. Hasil Pemilu ini menempatkan Golkar sebagai partai dengan peringkat pertama (19 kursi), kemudian PDIP berada pada peringkat kedua (13 kursi), peringkat ketiga di tempati PD (10 kursi). Partai politik lainnya yang berhasil memperoleh kursi di DPRD Provinsi Sumut adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS), PAN dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang masing-

masing memperoleh jumlah kursi yang sama yaitu 8 kursi. PDS mendapatkan 6 kursi, Partai Bintang Reformasi (PBR) memperoleh 5 kursi, Partai Bulan Bintang (PBB) mendapat 3 kursi dan partai lainnya PPIB, Partai Nasional Banteng Kemerdekaan, Partai Patriot Pancasila, Partai Pelopor, Partai Buruh Sosial Demokrat masing-masing memperoleh 1 kursi (KPU Provinsi Sumatera Utara, 2004).

Pemilu tahun 2009 diikuti 38 partai politik nasional dan 6 partai lokal di Aceh. Dalam konteks pemilihan anggota DPRD Provinsi Sumut Pemilu ini menghasilkan perolehan kursi di DPRD Provinsi Sumut ditempati Golkar sebagai peringkat tertinggi dengan jumlah 13 kursi, PDIP mendapat 12 kursi, PD mendapat 27 kursi, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendapat 11 kursi, PPP mendapat 8 kursi, PAN mendapat 7 kursi, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) mendapat 5 kursi, Gerindra mendapat 3 kursi, PKB mendapat 1 kursi dan terdapat fraksi gabungan (KPU Provinsi Sumatera Utara, 2009).

Pemilu tahun 2014 yang diselenggarakan tanggal 9 April 2014 diikuti 12 partai politik sebagai peserta Pemilu. Dalam konteks pemilihan anggota DPRD Provinsi Sumut, Pemilu ini menghasilkan komposisi perolehan kursi dengan peringkat tertinggi ditempati Golkar yang mendapat 17 kursi, PDIP mendapat 16 kursi, PD mendapat 14 kursi, Gerindra mendapat 13 kursi, Hanura mendapat 10 kursi, PKS mendapat 9 kursi, PAN mendapat 6 kursi, Partai Nasional Demokrat mendapat 5 kursi, PPP mendapat 4 kursi, PKB mendapat 3 kursi, PKPI mendapat 3 kursi (KPU Provinsi Sumatera Utara, 2014).

Perubahan kekuatan politik (perolehan kursi) di lembaga DPRD Sumut hasil Pemilu era pasca-Orde Baru memperlihatkan terjadinya pergeseran dukungan suara para pemilih ke partai politik lain di setiap Pemilu. Pergeseran ini dapat terjadi dikarenakan beberapa asumsi yakni: 1) citra partai politik dan figur Caleg turut mempengaruhi pilihan politik para pemilih. 2) kemampuan Caleg untuk memobilisasi dukungan suara dari kelompok-kelompok kepentingan (kelompok masyarakat) di berbagai segmentasi seperti organisasi sosial kemasyarakatan dan organisasi kepemudaan. 3) pengalihan pilihan politik para pemilih ke partai politik baru dengan berharap terjadi perubahan yang lebih baik dalam kehidupan.

Pada arena kelompok kepentingan sejumlah organisasi masyarakat yang berbasis sosial, etnis dan kepemudaan turut berpartisipasi melibatkan diri sebagai kelompok pendukung kandidat di Pemilu legislatif maupun eksekutif. Sebagai contoh studi yang dilakukan Humaizi, Ermansyah, dan Sinaga (2018) terhadap keterlibatan Paguyuban Etnis Tionghoa Indonesia (PASTI) dan Paguyuban Putra Jawa Kelahiran Sumatera (Pujakesuma) sebagai kelompok pendukung kandidat di Pilkada Kota Medan. Meski Pujakesuma dan PASTI berbeda pilihan dalam dukungan politik namun kedua organisasi masyarakat ini dapat menjaga keharmonisan diantara kelompok pendukung (Humaizi, Ermansyah, dan Sinaga, 2018: 139-143).

Pada organisasi kepemudaan terdapat kajian disertasi Amin (2013) yang menjelaskan peran organisasi Pemuda Pancasila (PP) dalam mendukung kandidat di pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara tahun 2008.

Keterlibatan organisasi kepemudaan lainnya juga terjadi pada Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan Indonesia (FKPPI), Ikatan Pemuda Karya (IPK) dan Pemuda Pancasila (PP) dalam arena Pemilu 2014 yang berjalan dengan hubungan timbal balik yang saling menguntungkan diantara organisasi kepemudaan dengan kandidat (lihat Amin, Ridho, & Nasution, 2016). Situasi ini memunculkan dua asumsi, yakni 1) tingkat partisipasi politik yang tinggi secara kelembagaan organisasi atau 2) pergeseran orientasi nilai-nilai organisasi yang sebelumnya berorientasi sosial bergeser ke orientasi politik (kepentingan). Bila mendasarkan fenomena ini pada prinsip demokrasi yang menekankan pada kebebasan hak-hak sipil dalam politik maka keterlibatan organisasi masyarakat dan organisasi kepemudaan dalam arena politik praktis sebagai suatu bentuk pilihan politik yang dihormati dan diakui dalam negara demokrasi.

4.2. Etnis Tionghoa di Provinsi Sumatera Utara

4.2.1. Sejarah Kedatangan Etnis Tionghoa di Provinsi Sumatera Utara

Sejarah kedatangan etnis Tionghoa masuk ke Indonesia menurut Onghokham (2008: 1) untuk berdagang dan menjadi kuli di perkebunan. Dalam konteks Provinsi Sumut, Juwono (2013) mencatat kedatangan etnis Tionghoa di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) bermula ketika pengusaha berkebangsaan Belanda bernama Jacob Nienhuys menyewa tanah milik Kesultanan Deli pada tahun 1863 untuk membuka perkebunan Tembakau. Pada masa ini pengaruh kekuasaan Hindia Belanda belum masuk ke wilayah Kesultanan Deli. Untuk memenuhi tenaga kerja yang akan dipekerjakan di perkebunan Tembakau J.

Nienhuys berupaya mencari tenaga kerja untuk menggerakkan produktifitas perkebunan Tembakau yang sedang di rintis. Tidak mudah bagi J. Nienhuys untuk mencari tenaga kerja dalam jumlah besar dari daerah di Indonesia mengingat pengaruh kekuasaan Hindia Belanda telah meluas di Indonesia terlebih lagi dengan konsep kerja paksa (*Kultuurstelsel*) yang dilakukan Hindia Belanda terhadap masyarakat Indonesia di Pulau Jawa maka keadaan ini turut memperkecil kesempatan J. Nienhuys untuk mencari tenaga kerja dari Indonesia.

Menurut Juwono (2013) dalam situasi sulit mendapatkan tenaga kerja, J. Nienhuys mengambil langkah untuk mendatangkan tenaga kerja etnis Tionghoa dari Penang-Malaysia dengan bantuan rekan-rekan pengusaha Inggris mereka yang berada di Penang dan Hongkong untuk mendatangkan tenaga kerja dari daratan Tionghoa. Langkah ini dilakukan Nienhuys dengan mempelajari pengalaman perkebunan Inggris yang berada di Malaysia Barat yang menggunakan konsep kuli kontrak melalui prinsip pembayaran uang muka dan pembayaran gaji di belakang pada akhir masa kontrak. Dengan konsep kuli kontrak J. Nienhuys beranggapan dapat mengontrol laju hasil produksi Tembakau dari perkebunan Tembakau (lihat Juwono, 2013: 90-99). Lokasi perkebunan Tembakau di Provinsi Sumut yang menjadi lokasi tempat etnis Tionghoa bekerja sebagai kuli kontrak perkebunan adalah Deli, Langkat dan Serdang (Reid, 2010: 300).

Seiring waktu berjalan di tahun 1868 Nienhuys sukses membangun komunikasi bisnis kepada pengusaha Inggris untuk menjamin suplay ketersediaan tenaga kerja etnis Tionghoa dari Malaysia dan pada tahun ini suplay tenaga kerja

etnis Tionghoa dikirim dari Malaysia ke Sumatera Timur melalui pelabuhan Belawan. Fasilitas penginapan disediakan dalam bentuk barak-barak untuk seluruh tenaga kerja kuli kontrak, sebagian dari kuli kontrak di angkat menjadi mandor atau dengan istilah lokal pada masa itu adalah *laukeh*. Pengangkatan mandor berguna untuk menyampaikan perintah-perintah kepada para kuli kontrak (lihat Juwono, 2013: 90-99; Reid, 2010: 300).

Setelah kerja kontrak di perkebunan berakhir, etnis Tionghoa yang memiliki modal dari penghasilan bekerja sebagai kuli kontrak di perkebunan Tembakau memilih untuk tinggal di kota dan bekerja sebagai pengerajin dan pedagang (Napitupulu, Sanusi, Sidabutar, & Lubis, 1991: 21). Karakteristik kota yang erat dengan aktivitas perdagangan menjadi daya tarik bagi etnis Tionghoa yang berdagang sehingga Coppel (1994: 29-30) menyimpulkan pemukiman penduduk etnis Tionghoa berada di sekitar daerah pusat perdagangan. Salah satu pemukiman etnis Tionghoa yang dikenal di Kota Medan ialah perkampungan dengan sebutan kota Tionghoa. Dalam tulisan Purnawibowo dan Koestoro (2015) dijelaskan penyebutan kota Tionghoa oleh masyarakat setempat dikarenakan dahulunya merupakan pemukiman masyarakat Tionghoa yang dikuatkan dengan bukti barang-barang keramik buatan Tionghoa (lihat Purnawibowo dan Koestoro (2015: 59).

Pemukiman etnis Tionghoa lainnya yang tersebar di Provinsi Sumut terekam dalam artikel yang ditulis oleh Koestoro, Purnawibowo, dan Oetomo (2016) memberikan argumentasi yang kuat terhadap aktivitas etnis Tionghoa dengan intensitas yang tinggi di tiga lokasi dalam area Provinsi Sumut yakni

perkampungan kota Tionghoa di Kota Medan, perkampungan kota Rantang di Deli Serdang dan Pulau Kampai di Kabupaten Langkat. Kesimpulan yang diberikan oleh mereka ialah tingginya aktivitas etnis Tionghoa melalui jalur maritim di pesisir timur Provinsi Sumut pada awalnya bermula di Pulau Kampai Kabupaten Langkat abad ke 8 hingga akhir abad ke 9 Masehi kemudian pada awal abad 9 muncul kota Tionghoa di Kota Medan (Kecamatan Medan Labuhan) yang berkembang pesat hingga pada abad ke 13-14 dan pada akhirnya perkembangan kota Tionghoa menurun dan digantikan dengan kota Rantang di Deli Serdang dan Pulau Kampai di Kabupaten Langkat pada abad ke 15-16 (lihat Koestoro et al., 2016: 96: 109). Dari catatan yang diperoleh dari sejumlah literatur dapat dijelaskan bahwa pemukiman etnis Tionghoa pada masa lalu berkaitan erat dengan tiga lokasi yang berada dalam wilayah Provinsi Sumut yaitu Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Langkat.

Pemukiman kota Tionghoa di Kota Medan yang memiliki aspek sejarah yang kuat untuk menjelaskan keberadaan etnis Tionghoa di Provinsi Sumut dan secara khusus di Kota Medan kini kawasan atau pemukiman kota Tionghoa saat ini telah terdaftar sebagai Situs Cagar Budaya (SCB) di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan melalui dasar hukum Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pelestarian Bangunan dan/satau Lingkungan Cagar Budaya, meski kota Cian telah terdaftar menjadi SCB namun dalam pengelolaan SCB kota Tionghoa belum optimal (Sinaga, 2015: 1-13); Purnawibowo dan Koestoro, 2015: 57-76). Dengan demikian keberadaan situs bersejarah etnis Tionghoa di Kota Medan turut menjadi nilai positif dalam

membentuk keberagaman budaya dan nilai-nilai multikultural di tengah kehidupan masyarakat Kota Medan.

4.2.2. Partisipasi Etnis Tionghoa Dalam Politik di Provinsi Sumatera Utara

Kiprah etnis Tionghoa dalam arena politik di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mulai terlihat sejak era reformasi di tahun 1999 yang ditandai dengan kemunculan sejumlah partai politik yang dominan beranggotakan masyarakat etnis Tionghoa seperti dicatat Suryani & Azmy (2016: 59-64) Partai Reformasi Tionghoa Indonesia (PARTI), Partai Pembauran Indonesia (Parpindo) dan sejumlah organisasi sosial kemasyarakatan dalam lingkup nasional seperti Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI), Gerakan Anti Diskriminasi (GANDI) dan Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI).

Kiprah etnis Tionghoa dalam politik di Provinsi Sumut dapat ditelusuri melalui partisipasi mereka menjadi keanggotaan partai di sejumlah partai politik. Dalam arena politik elektoral partisipasi politik mereka di mulai di Kota Medan ketika Pemilu legislatif tahun 1999 diselenggarakan. Pada pemilu legislatif ini terdapat sejumlah nama-nama dari etnis Tionghoa yang berpartisipasi menjadi calon legislatif untuk menjabat di DPRD kota Medan seperti diantaranya Lily, Janlie, A Hie, A Toni, R Eddy, Rudy Wu, Yan Loe. Pemilu tahun 1999 ini sebagai awal kiprah etnis Tionghoa masuk dalam dunia politik yang dimulai pada Pemilu anggota DPRD Kota Medan. Selanjutnya di beberapa Pemilu pasca-Orde Baru mereka (etnis Tionghoa) berpartisipasi di dalam kontestasi Caleg DPRD kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Sumut. Pada kontestasi jabatan eksekutif

terdapat nama Sofyan Tan yang berkontestasi sebagai calon Walikota Medan tahun 2010 meski pada akhirnya Sofyan Tan tidak berhasil terpilih menjadi Walikota Medan tahun 2010 namun Sofyan Tan berhasil masuk dalam putaran kedua dari Pilkada tersebut. Ini sekaligus menandakan eksistensi etnis Tionghoa dalam kontestasi politik elektoral telah menguat di Kota Medan (KPU Provinsi Sumut, 2010).

Nasikun (1984: 30) membagi struktur masyarakat Indonesia berdasarkan dua ciri yaitu 1) secara horizontal berkaitan mengenai kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku bangsa, agama, adat dan kedaerahan. 2) secara vertikal berkaitan dengan adanya perbedaan antara lapisan atas dan bawah yang cukup tajam. Pembelahan struktur yang dijelaskan Nasikun (1984) dalam konteks Pilkada Kota Medan tahun 2010 terasa menguat disaat putaran kedua Pilkada Kota Medan dilangsungkan. Isu sentimen etnis dan agama menjadi merebak ketika menjelang pemungutan suara putaran kedua Pilkada Kota Medan tahun 2010. Kiprah etnis Tionghoa dalam politik sebenarnya bukan sesuatu yang baru La Ode (2012) mencatat pada masa pra kemerdekaan kiprah tersebut terekam melalui gerakan perlawanan etnis Tionghoa melawan Belanda di Batavia (Sekarang bernama Jakarta) pada tahun 1740. pada tahun 1777 masyarakat etnis Tionghoa mendirikan kerajaan bernama Lanfang Gongheguo (Republik Lanfang) di Kalimantan Barat bertempat pada daerah bernama Mandor (La Ode, 2012: 5-6). Catatan yang didapat dari La Ode (2012) menggambarkan bahwa aspek kekuasaan pernah menjadi perhatian dari kalangan etnis Tionghoa di Indonesia pada masa lalu. Bisa

jadi aspek masa lalu ini yang menjadi pertimbangan era Orde Baru untuk membuat pembatasan hak politik bagi warga etnis Tionghoa di Indonesia.

4.3. Partai Politik Pengusung Caleg Etnis Tionghoa di Pemilu Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara.

4.3.1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Tahun 1999 sebagai tahun bersejarah dalam sistem kepartaian Indonesia yang sebelumnya di era pemerintah orde baru hanya memberikan ruang saluran politik kedalam tiga partai yaitu Golkar, PDI dan PPP penyempitan saluran politik ini dikenal dengan istilah penyederhanaan (fusi) partai politik menurut Ufen (2010: 19) sejak konsep penyederhanaan partai diterapkan pada tahun 1973 pelaksanaan pemilu di era rejim orde baru selalu Golkar tampil sebagai pemenang pemilu dengan strategi Golkar yang “memastikan” dukungan dari kalangan angkatan bersenjata, pegawai negeri sipil, buruh, nelayan, tani, pemuda, mahasiswa, veteran sehingga Golkar selalu memperoleh 60% suara di setiap pemilu.

Penyederhanaan partai politik di tahun 1973 telah memaksa tersedianya 3 saluran politik berbentuk partai yakni Golkar yang di dukung kekuatan pemerintah, angkatan bersenjata dan birokrasi, kemudian PDI di dukung oleh gabungan kekuatan politik yang berorientasi sekuler dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang berisikan gabungan kekuatan politik berorientasi islam. Situasi politik di era orde baru tidak memberikan peluang bagi PDI dan PPP untuk dapat mengembangkan pengaruh politiknya hingga ke akar rumput secara

struktural, hal ini dibuktikan dengan kebijakan pemerintah rejim orde baru bagi PDI dan PPP yang dilarang untuk membentuk cabang struktur organisasi partai di bawah tingkat Kabupaten (Ufen, 2010: 19).

Berakhirnya rejim orde baru pada Mei 1998 memberikan dampak perubahan bagi berlangsungnya sistem pemerintahan dan politik di Indonesia seperti yang terjadi dalam sistem kepartaian Indonesia di tahun 1999 memberikan ruang yang luas bagi terbentuknya partai politik secara mandiri dan salah satu partai yang mendeklarasikan diri sebagai partai “baru” di tahun 1999 adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang didirikan oleh Megawati. Faktor lain yang membuat kemunculan PDIP sebagai kekuatan partai baru di tahun 1999 tidak terlepas dari dinamika internal yang terjadi di dalam PDI yang menurut O’Rourke (2002: 7-8) dalam Ambardi (2009: 138) bersumber dari konflik kepemimpinan di tahun 1990-an dimana ketika itu Surjadi sebagai pemimpin PDI melakukan aktivitas kampanye secara kuat saat menyongsong pemilu 1992 dengan menyuarakan reformasi pemilu, masa bakti jabatan presiden yang harus dibatasi dan pemerintahan bersih.

Dalam penjelasan Ambardi (2009) PDI yang bersuara untuk reformasi pemilu, masa bakti jabatan presiden yang harus dibatasi dan pemerintahan bersih di pemilu tahun 1992 berhasil mendapatkan perhatian publik, dampak dari strategi PDI ini kemudian membuat pemerintah ketika itu mengambil sikap untuk mengintervensi kongres PDI dengan berusaha mempersempit peluang Surjadi untuk kembali menjadi pemimpin PDI dan memuluskan Megawati menjadi pemimpin PDI. Menjabatnya Megawati sebagai ketua umum PDI malah membuat

popularitas PDI meningkat dan ini menjadi perhatian serius kembali bagi pemerintah. Di tahun 1996-1997 pemerintah berupaya kembali untuk mengintervensi internal PDI dengan berupaya memindahkan tampuk kepemimpinan PDI dari Megawati untuk kembali ke Surjadi. Dengan kondisi ini kemudian membuat Megawati beserta pengikutnya untuk keluar dari PDI dan membentuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau disingkat dengan PDIP (Ambardi, 2009: 138-139), akan tetapi Jensen (2008: 34) lebih meyakini yang terjadi di tahun 1996 terjadinya pemecatan oleh PDI terhadap Megawati di tahun 1996. Pada akhirnya Megawati dengan pengikutnya mendirikan partai lain yang memiliki kemiripan nama dengan PDI yaitu PDIP yang di deklarasikan di tahun 1999.

Kemiripan nama PDIP dan PDI mengindikasikan adanya kehendak Megawati bersama pengikutnya untuk menjaga nilai historis dan nilai ideologis yang pernah mereka kenal sewaktu berada di dalam PDI. Kematangan karir politik Megawati sampai pada puncaknya di tahun 1993 dimana dirinya menjabat sebagai pemimpin PDI, sebagai perempuan yang memimpin partai tentu telah menjadi poin tersendiri bagi dirinya meski faktor popularitas dari ayahnya begitu melekat bagi publik untuk menilai dirinya namun kondisi dimana partai (PDI) yang dipimpin olehnya di tahun 1993 sebagai partai yang diawasi oleh pemerintah (termasuk juga PPP) maka secara mentalitas tentu tidak semua perempuan mampu berada dalam kondisi ini. Karakter dari Megawati dinilai Jensen (2008: 34) sebagai orang yang tenang, tidak terlalu keras dalam mengkritik pemerintah Orde Baru demi terjaganya keselamatan para pendukungnya.

Semangat perjuangan PDIP yang menyuarakan kepentingan dari masyarakat yang terpinggirkan seperti buruh, tani dan pelaku ekonomi informal serta ditambah dengan dinamika politik yang di alami oleh Megawati di PDI waktu lalu telah membuat citra PDIP sebagai partai untuk orang-orang yang tertindas secara sosial, politik dan ekonomi. Dari spirit ini kemudian membuat PDIP mendapatkan tempat dalam perhatian publik yang bermuara pada suksesnya PDIP meraih peringkat pertama suara terbanyak hasil pemilu 1999 yang sekaligus menandakan kemenangan PDIP secara nasional dengan perolehan suara 35.689.073 atau sebanyak 154 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan disusul peringkat suara terbanyak kedua adalah Golkar (KPU RI, 2015).

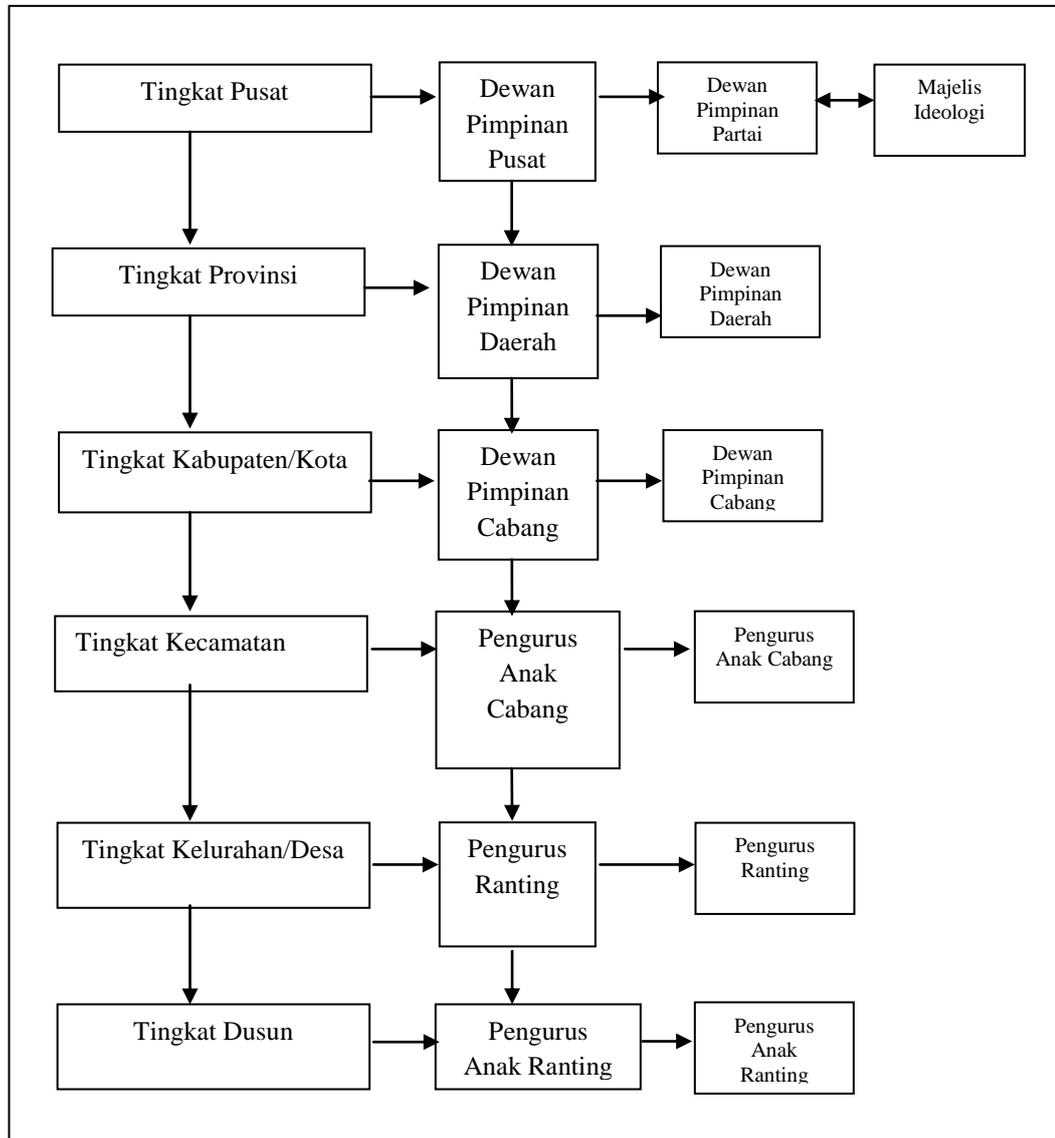
Pemilu tahun 1999 untuk pertama kalinya partai Golkar mengalami kekalahan dimana sejak Pemilu yang berlangsung di era Ode Baru partai Golkar selalu berada pada peringkat paling atas dalam perolehan suara. Besarnya isu menolak rejim Orde Baru beserta segala antek-antek yang berkaitan Orde Baru ternyata hasil Pemilu tahun 1999 partai Golkar mampu bertahan dari dinamika politik saat itu dengan memperoleh posisi kedua perolehan suara dengan posisi pertama di peroleh PDIP.

Pada Pemilu di tingkat nasional di tahun 1999 PDIP mendapat 154 kursi dengan SA, kemudian pada Pemilu tahun 2004 PDIP memperoleh 20% suara atau 109 kursi. Pemilu tahun 2009 mendapat 14.01% atau 94 kursi di DPR dan di Pemilu 2014 PDIP memperoleh 18.96% suara dengan jumlah kursi di DPR sebanyak 109 kursi. Dalam lingkup Provinsi Sumut Pemilu anggota DPRD Sumut di tahun 2004 PDIP memperoleh 15.29% suara atau 13 kursi di DPRD Sumut.

Pemilu 2009 PDIP mendapatkan 12 kursi Pemilu 2014 PDIP memperoleh 16 kursi di DPRD Sumut dalam Pemilu ini PDIP berada pada peringkat ke 2 dari total 12 partai politik peserta Pemilu.

Dalam konteks Pemilu anggota DPRD Provinsi Sumut tahun 2014 PDIP mengusung 5 orang Caleg etnis Tionghoa yang terdiri dari 4 orang laki-laki dan 1 orang perempuan yang ditempatkan di beberapa Dapil. Dalam Dapil Sumut 1 terdapat Brilian Moktar, SE.,MM (Moktar) dengan nomor urut 1 dan Ferdinan Godang, SE.,SH (Godang) dengan nomor urut 8. Kemudian dalam Dapil 2 terdapat Juliutari (perempuan) dengan nomor urut 5. Dapil Sumut 3 diisi Sukiran, SH.,M.Kn dengan nomor urut 8 dan terakhir terdapat Yo Emil Lines, SE (Lines) yang ditempatkan di Dapil Sumut 12 dengan nomor urut 9 (KPU Provinsi Sumut, 2014).

Gambar: 4.3.1. Struktur Organisasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)



Sumber: Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PDIP tahun 2010.

4.7.2. Partai Gerakan Indonesia Raya

Partai Gerindra didirikan tanggal 6 Februari 2008 oleh sejumlah tokoh diantaranya Prabowo Subianto, Ahmad Muzani, Fadli Zon, Muchdi PR (KPU, 2014). Gerindra mengikuti Pemilu untuk pertama kalinya di tahun 2009.

Rosenfield (2012) dalam disertasinya menyebutkan Prabowo Subianto (Subianto) mantan jenderal militer, memiliki kekuatan finansial dan sebagai menantu dari penguasa di era Orde Baru (Suharto) mempersiapkan partai Gerindra sebagai kendaraan politik pribadi bagi Subianto untuk menghadapi Pemilu.

Pemilu tahun 2009 Subianto membentuk koalisi politik dengan PDIP yang menghasilkan keputusan politik Megawati sebagai calon Presiden dan Subianto sebagai calon Wakil Presiden Rosenfield (2012: 104-105). Pemilu Presiden yang dilaksanakan 8 Juli tahun 2009 diikuti 3 pasang calon Presiden dan Wakil Presiden yaitu Susilo Bambang Yudoyono berpasangan dengan Budiono, Muhammad Jusuf Kalla berpasangan dengan Wiranto dan Megawati Sukarnoputri berpasangan dengan Prabowo Subianto. Hasil Pemilu ini menetapkan Susilo Bambang Yudoyono dan Budiono sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih di Pemilu Presiden tahun 2009.

Pada Pemilu legislatif yang diselenggarakan pada 9 April tahun 2009 (sebelum Pemilu Presiden diselenggarakan) partai Gerindra memperoleh hasil maksimal dengan memperoleh 4,46 persen suara atau 26 kursi di DPR kesuksesan ini terjadi kembali di Pemilu tahun 2014 partai Gerindra memperoleh 11,81 persen suara dengan mendapatkan 73 kursi di DPR dari total 560 kursi yang tersedia. Dalam konteks lokal di Pemilu anggota DPRD Provinsi Sumut tahun 2009 partai Gerindra memperoleh 3 kursi di DPRD Provinsi Sumut dan kemudian meningkat di Pemilu tahun 2014 dengan memperoleh 13 kursi di DPRD Provinsi Sumut.

Dalam ajang kontestasi Pemilu anggota DPRD Provinsi Sumut tahun 2014 partai Gerindra mengusung 2 orang Caleg dari etnis Tionghoa yang ditempatkan pada Dapil yang berbeda. Kedua orang Caleg tersebut adalah Tony Chandra, SH di Dapil Sumut 2 dengan nomor urut 5 dan Sonny Firdaus, SH (Firdaus) di Dapil Sumut 1 dengan nomor urut 4. Hasil Pemilu anggota DPRD ini menetapkan Firdaus sebagai Caleg terpilih dari partai Gerindra dari Dapil Sumut 1.

Secara organisatoris keputusan penting dalam Partai Gerindra banyak di pengaruhi dari pendapat Dewan Pembina Partai Gerindra. Tokoh utama dalam Dewan Pembina ialah Subianto. Dewan Pembina berada pada struktur tertinggi di organisasi Partai Gerindra yang membawahi Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pakar dan Dewan Penasehat. Kondisi ini sekaligus menerangkan bahwa tokoh sentral dalam Partai Gerindra adalah Subianto. Partai Gerindra memiliki tingkatan organisasi partai hingga ke tingkat desa/kelurahan dengan unit terkecil dari organisasi bernama Pimpinan Ranting. Selain struktur organisasi yang berjenjang dari tingkat pusat hingga tingkat desa/kelurahan, Partai Gerindra memiliki badan/lembaga partai dan organisasi sayap partai. Secara lengkap struktur organisasi Partai Gerindra pada saat menjelang Pemilu tahun 2014 di tampilkan pada gambar berikut ini:

4.3.3. Partai Amanat Nasional

Partai Amanat Nasional (PAN) memiliki keterkaitan historis dengan organisasi Islam Muhammadiyah. Muhammadiyah sebagai organisasi Islam modern yang terbentuk sekitar tahun 1920-an (Vermonte, 2014: 91). PAN lahir setelah rejim Orde Baru berakhir di tahun 1998 dan secara resmi PAN dideklarasikan pada tanggal 23 Agustus 1998 di Istora Senayan Jakarta (lihat Kristiadi, 2009: 106; Najib, 1999: 15). PAN dibentuk oleh Amin Rais, sewaktu gerakan reformasi 1998 terjadi Rais turut berperan dalam melancarkan gerakan reformasi bersama para mahasiswa untuk menggulingkan rejim Orde Baru yang mendesak Suharto mundur dari jabatan Presiden Indonesia di tahun 1998 (Macdonald, 2013: 57).

Tidak berselang lama dari tergulingnya rejim Orde Baru, Rais berinisiatif membentuk PAN bersama tokoh-tokoh Muhammadiyah untuk melakukan reorientasi gerakan politik Muhammadiyah pasca jatuhnya rezim Orde Baru yang dipopulerkan melalui konsep *ijtihad* politik dengan tujuan membangun Indonesia baru, situasi ini kemudian mengantarkan Rais sebagai ketua PAN pertama (Qodir, 2010: 147). Dari sudut pandang aspek historis bisa dikatakan kelahiran PAN memiliki keterkaitan erat dengan Muhammadiyah setidaknya keterkaitan ini dapat ditelusuri dari aktor-aktor yang terlibat sebagai pelopor pendiri PAN merupakan tokoh-tokoh dari Muhammadiyah seperti Amin Rais yang ketika tahun 1998 menjabat sebagai ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah (Asyari, 2008: 25). Keterkaitan historis tokoh-tokoh Muhammadiyah dengan politik telah sejak lama dapat ditelusuri rekam jejak mereka seperti halnya pembentukan partai

Masyumi di era Orde Lama yang dipelopori tokoh-tokoh Muhammadiyah (lihat Romli, 2013: 37). Meski ada keterkaitan historis diantara PAN dan tokoh-tokoh Muhammadiyah namun Nasution (2013: 7) menjelaskan dari aspek keorganisasian PAN dan Muhammadiyah tidak memiliki hubungan hirarki organisasi atau dengan kata lain dua organisasi yang berbeda.

Konsep *ijtihad* dalam pandangan Muhammadiyah menurut Asyari (2008: 30) didefinisikan dengan "berjuang," "mengerahkan," "berusaha" atau "pengerahan tenaga". Pengertian *ijtihad* dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai usaha sungguh-sungguh yang dilakukan para ahli agama untuk mencapai suatu putusan (KBBI, 2008). Dengan demikian konsep *ijtihad* politik Muhammadiyah dapat diasumsikan sebagai suatu usaha yang dilakukan Muhammadiyah untuk untuk mencapai tujuan organisasi mereka di arena politik salah satunya dengan mendirikan partai politik dan berkompetisi di Pemilu. Asumsi ini sejalan dengan pernyataan Asyari (2008: 26) bahwa impian utama para tokoh Muhammadiyah untuk menjadi Presiden. Pernyataan ini merepresentasi simbol kekuasaan dalam jabatan Presiden, melalui posisi Presiden akan lebih mudah bagi Muhammadiyah untuk membangun Indonesia sesuai dengan nilai-nilai tujuan organisasi mereka.

PAN merupakan partai nasionalis yang menggunakan gerakan nilai-nilai agama sebagai kekuatan organisasi (Allen, 2012: 59). Haluan nasionalis PAN tergambar dari Pancasila sebagai ideologi partai dan mengadopsi nilai-nilai Islam dan demokrasi sehingga partai ini mengambil posisi sebagai partai terbuka dan mandiri. Ideologi dan nilai-nilai perjuangan PAN tergambar dalam platform partai

yang mengkonsentrasikan pada tujuan untuk menegakkan nilai-nilai agama, kedaulatan rakyat, pemerintahan yang baik dan bersih, penegakan hukum dan kesejahteraan sosial (lihat Sukmajati, 2011: 103-104). Ketika menjelang Pemilu tahun 1999 PAN cukup menyita perhatian publik Indonesia dengan sosok figur Amin Rais.

Secara nasional dari data infografik Komisi Pemilihan Umum (KPU) tahun 2014 PAN sebagai peserta Pemilu untuk pertama kali di tahun 1999 hasil Pemilu secara nasional PAN memperoleh 7.12 % suara atau 35 kursi. Pemilu tahun 1999 PAN berada pada peringkat ke 5 dari total 48 peserta partai politik yang mengikuti Pemilu. Pemilu ini bukan hanya sebagai Pemilu perdana bagi PAN namun juga sekaligus sebagai momentum untuk menguji daya penerimaan PAN oleh publik secara luas terlebih lagi Shair-Rosenfield (2012: 101) mencatat Rais mendapatkan kesulitan dalam meyakinkan anggota Muhammadiyah untuk mendukung dan bergabung bersama PAN. Pemilu tahun 2004 PAN memperoleh 6.41 % suara atau 53 kursi, pemilu 2004 PAN berada pada peringkat ke 5 dari total peserta 24 partai politik.

Pemilu 2009 PAN mendapatkan 6.03% suara 46 kursi sehingga dalam pemilu ini PAN berada pada peringkat ke 5 dari total 38 peserta partai politik. Pemilu tahun 2009 sebagai Pemilu yang cukup “tegang” bagi PAN mengingat terdapat faksi-faksi yang berbeda pandangan di lingkungan elit PAN yang kemudian berdampak pada kemunculan Partai Matahari Bangsa (PMB) (lihat Noor, 2012: 13). Pemilu tahun 2014 PAN memperoleh 7.57% suara atau 49 kursi di DPR sehingga PAN berada pada peringkat ke 6 dari 12 peserta partai politik di

Pemilu 2014 (KPU, 2014). Perolehan persentasi suara maupun kursi yang diperoleh PAN secara nasional pada Pemilu 1999 sampai dengan Pemilu 2014 PAN rata-rata berada pada peringkat ke 5 sehingga ini menandakan bahwa PAN mampu menunjukkan sekaligus mempertahankan eksistensi mereka secara nasional.

Dalam konteks lokal di Provinsi Sumut, kekuatan politik PAN di lembaga DPRD Provinsi Sumut hasil Pemilu 1999 cukup diperhitungkan mengingat PAN sebagai partai baru dan Pemilu 1999 sebagai Pemilu pertama yang diikuti PAN ternyata PAN mampu meraih kesuksesan di Provinsi Sumut dengan mendapat 7 kursi di DPRD jumlah kursi ini menempatkan PAN sebagai peringkat ke 4 dari total 48 partai politik peserta Pemilu 1999 di tingkat Provinsi Sumut. Sebagai partai terbesar ke 4 di Provinsi Sumut hasil Pemilu 1999 PAN terlihat mampu bersaing dengan partai-partai yang lebih tua secara pengalaman seperti PPP, Golkar dan PDIP.

Perolehan kursi DPRD Provinsi Sumut Pemilu 1999 peringkat teratas di raih PDIP dengan 28 kursi, peringkat ke 2 diraih Golkar dengan mendapat 17 kursi dan peringkat ke 3 diraih PPP dengan 8 kursi di DPRD Provinsi Sumut. Pemilu 2004 untuk memilih anggota DPRD Provinsi Sumut PAN mendapat 8 kursi di DPRD Provinsi Sumut sehingga PAN berada pada peringkat ke 4 dari total 24 partai politik peserta Pemilu 2004. Hasil Pemilu ini menempatkan peringkat PAN setara dengan peringkat PPP yang juga memperoleh 8 kursi.

Pemilu anggota DPRD Provinsi Sumut tahun 2009 PAN memperoleh 7 kursi dengan peringkat ke 7 dari total 12 peserta partai politik. Pemilu 2014 PAN

memperoleh 6 kursi di DPRD Sumut dalam Pemilu ini PAN berada pada peringkat ke 7 dari total 12 partai politik peserta Pemilu di tahun 2014. Perolehan kursi PAN di DPRD Provinsi Sumut pada empat Pemilu yakni 1999, 2004 dan 2009 cenderung menghasilkan perolehan suara yang stabil meski pada Pemilu 2009 PAN bersaing dengan PMB yang nota benanya mengejar segmentasi lumbung suara di organisasi Muhammadiyah.

Jurdi (2016: 193) menyebutkan kelahiran PMB berasal dari dinamika internal yang terjadi di PAN. Dinamika internal ini dilihat Haris (2014: 138) berbentuk perseteruan antara kubu pendukung Amin Rais dan kubu pendukung Sutrisno Bahir sehingga aktivis muda Muhammadiyah memprakarsai terbentuknya PMB di tahun 2006, meskipun demikian Muhammadiyah menolak untuk melibatkan diri ke dalam partai politik manapun (van Bruinessen, 2013: 34). Dalam sejarah Pemilu legislatif di Provinsi Sumut untuk pertama kalinya pada Pemilu legislatif tahun 2014 PAN Provinsi Sumut mengakomodasi keterwakilan etnis Tionghoa dalam DCT calon anggota DPRD Provinsi Sumut.

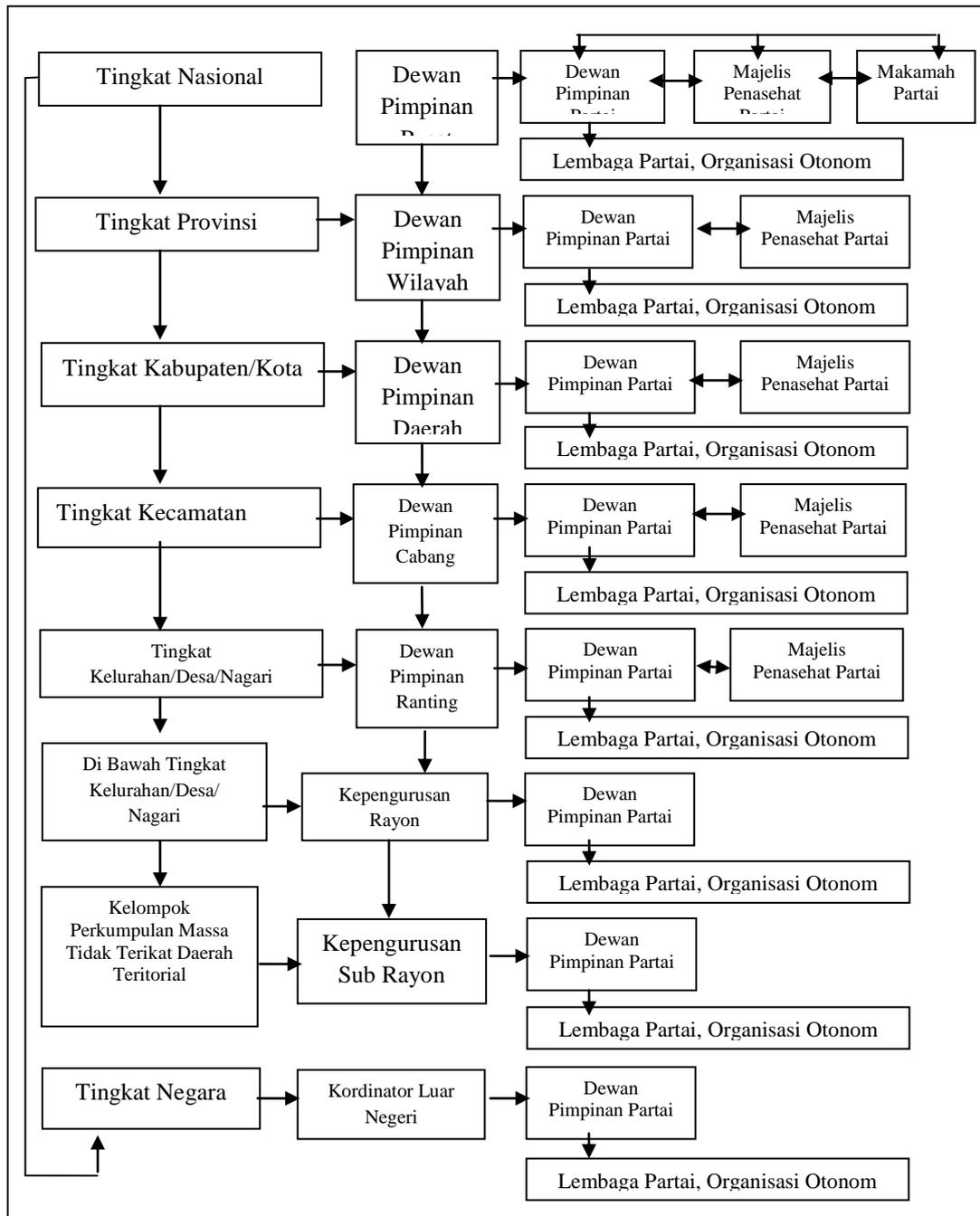
Jumlah etnis Tionghoa sebagai calon anggota DPRD yang diakomodasi PAN pada Pemilu 2014 berjumlah 1 orang dengan nama Tjia Susanto Wijaya bergelar pendidikan Insinyur (Ir) beragama Budha yang ditempatkan PAN Provinsi Sumut untuk berkompetisi di Dapil Sumut 3 dengan nomor urut 3. Bagi mayoritas masyarakat awam berasumsi PAN sebagai partai Islam sehingga langkah PAN mengakomodasi calon anggota DPRD beragama non muslim menjadi sebuah pertanyaan seperti halnya pada Tjia Susanto Wijaya yang diakomodasi dalam DCT calon anggota DPRD PAN Sumut. Untuk menjelaskan

hal ini Romli (2013: 40) berpendapat PAN merupakan partai nasionalis dan plural. Pandangan ini juga diperkuat dari aspek platform partai, PAN sebagai partai nasionalis, partai terbuka, menghormati prinsip demokrasi serta berpedoman dengan nilai-nilai Islam. Dari penjelasan ini maka sikap politik PAN Sumut telah sejalan dengan ideologi dan platform PAN.

Dalam struktur organisasi PAN terlihat eksistensi PAN mencakup wilayah kerja di dalam negeri dan luar negeri. Wilayah kerja dalam negeri menjadi sentral perhatian PAN sebagaimana partai politik lainnya. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN sebagai struktur organisasi tertinggi PAN, dalam pelaksanaan tugas organisasi DPP PAN di kontrol oleh Majelis Penasehat Partai (MPP) yang berfungsi untuk memberikan nasehat-nasehat penting kepada DPP. Fungsi kontrol terhadap penegakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan partai diperankan oleh Makamah Partai (MP).

Pada tingkatan hirarki organisasi PAN setelah DPP terdapat di bawah DPP kepengurusan PAN ditingkatan negara yang disebut sebagai Kordinator Luar Negeri (KLN). Kemudian di dalam negeri tingkatan hirarki organisasi PAN setelah DPP terdapat Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), DPW berkedudukan di tingkat Provinsi yang mengangkat kepengurusan ditingkatan kabupaten/kota yang disebut dengan nama Dewan Pimpinan Daerah (DPD). DPD selanjutnya menetapkan kepengurusan di tingkat kecamatan yang disebut dengan Dewan Pimpinan Cabang (DPC). DPC menetapkan kepengurusan di tingkat ranting yang disebut Dewan Pimpinan Ranting (DPRt). Selanjutnya DPRt menetapkan kepengurusan rayon dan sub rayon.

Gambar: 4.3.3. Struktur Organisasi Partai Amanat Nasional (PAN)



Sumber: Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PAN Hasil Kongres IV PAN di Bali Tahun 2015

Dalam setiap tingkatan struktur organisasi PAN memberikan ruang bagi setiap struktur untuk dapat membentuk lembaga partai dan organisasi otonom dimulai dari tingkat paling atas hingga paling. Kondisi ini memperlihatkan sisi demokratis dari PAN yang membuka ruang aktualisasi bagi setiap jenjang organisasi untuk mengembangkan partai di daerah kerja masing-masing. Organisasi otonom telah ada saat ini di PAN seperti Barisan Muda PAN (Sukmajati, 2011: 105-106).

4.3.4. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia

Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) sebelumnya bernama Partai Keadilan dan Persatuan (PKP). PKPI dibentuk 15 Desember 1998 oleh tokoh-tokoh yang pernah berada di dalam Partai Golkar seperti Edi Sudrajat dan Hayono Isman. PKPI mengikuti Pemilu sejak tahun 1999. Pada Pemilu 1999 PKPI masih bernama PKP dan pada kemudian menggunakan nama PKPI di Pemilu 2004, perubahan nama ini disinyalir terjadi karena PKP tidak lolos electoral threshold (Haris, 2014: 39; Tandjung, 2007: 109). PKPI berhaluan nasionalis dengan mengusung Pancasila sebagai ideologi partai (Vermonte, 2014: 83).

Berdasarkan data infografik Pemilu yang dipublikasi KPU RI tahun 2014 diperoleh jumlah suara PKPI pada Pemilu tahun 1999 sejumlah 1, 01 persen suara dan mendapat 6 kursi dengan sistem *Stambus Accord*. Sebagai partai baru pada Pemilu tahun 1999 PKPI sukses mengirimkan 6 orang Caleg mereka berada di DPR. Selanjutnya Pemilu 2004 PKPI mendapatkan 1.26 % suara secara nasional

dengan memperoleh 1 kursi (Vermonte, 2014: 78). Kemudian Pemilu 2009 dan Pemilu 2014 PKPI tidak mendapatkan kursi di DPR. Pada Pemilu 2014 dari 12 partai politik peserta Pemilu terdapat 2 partai politik yang tidak mendapatkan kursi yaitu PKPI dan PBB.

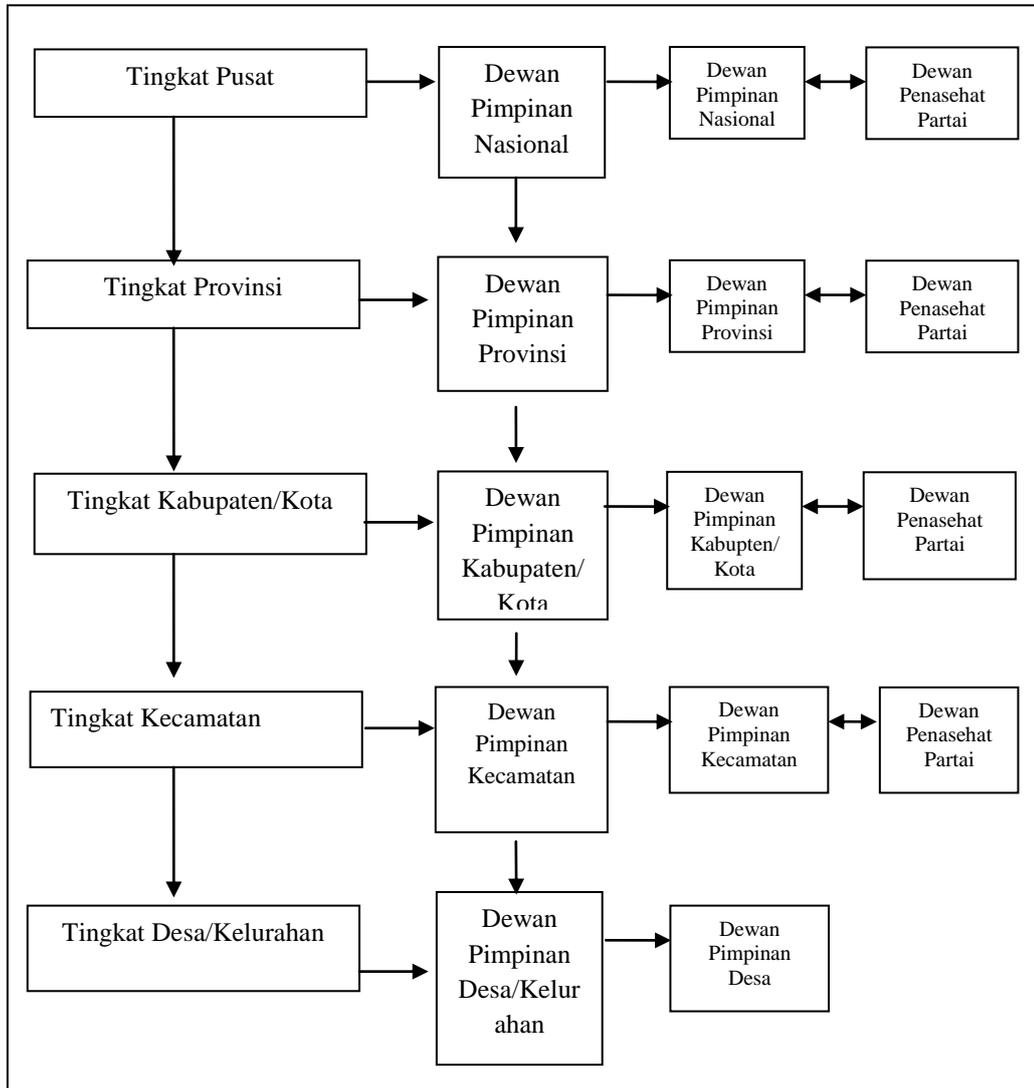
Dalam konteks lokal di Provinsi Sumut PKPI terbentuk bersamaan terbentuknya PKPI di tingkat pusat dan kepemimpinan PKPI Provinsi Sumut pertama kalinya dipimpin Haryanto SE kemudian dalam kurun beberapa tahun selanjutnya kepemimpinan PKPI Provinsi Sumut berganti kepada Ir. Juliski Simorangkir, MM. PKPI sebagai partai nasionalis yang secara prakteknya mampu mendistribusikan struktur kekuasaan di internal partai tanpa memandang perbedaan. Sikap nasionalis PKPI salah satunya tergambar dalam struktur kepengurusan PKPI di Provinsi Sumut seperti profil Haryanto yang berasal dari keturunan etnis Tionghoa dan beragama Budha. Sangat jarang sekali mendapatkan potret kepemimpinan partai di tingkat lokal pada era pasca-Orde Baru yang berasal dari etnis Tionghoa.

Di tengah-tengah situasi sentimen etnis di masa reformasi tahun 1998 membuat trauma berat bagi etnis Tionghoa yang menjadi korban dari kerusuhan sosial ketika itu dan berakibat pada minimnya partisipasi etnis Tionghoa untuk melibatkan diri dalam arena politik pasca-Orde Baru namun Haryanto memiliki cara pandang yang berbeda berkaitan dengan partisipasi dirinya masuk ke arena politik. yang berakibat Haryanto menjelaskan bahwa aktivitas organisasi sewaktu menjadi mahasiswa serta rutinitas kesibukan di organisasi sosial telah membawa dirinya kepada lingkungan yang lebih luas dan bertemu dengan orang-orang yang

berwawasan luas, seiring waktu berjalan di tahun 1999 Haryanto melalui pergaulan jaringan yang luas mendapatkan kesempatan untuk dipercaya memimpin PKPI (sebelumnya bernama PKP) di tahun 1999. Kepercayaan ini diterima Haryanto dengan rasa percaya diri, tidak sulit bagi Haryanto memunculkan sikap percaya diri untuk memimpin organisasi yang bernama partai (PKP) karena Haryanto sudah terbiasa hidup dalam dunia organisasi mahasiswa dan organisasi sosial (Wawancara Haryanto, 2018).

Pemilu yang berlangsung tahun 1999 di arena Pemilu anggota DPRD Provinsi Sumut PKPI mendapat 1 kursi. Pada Pemilu 2004 dan Pemilu 2009 PKPI tidak mendapatkan kursi di DPRD Provinsi Sumut, kondisi ini secara otomatis memperkecil kekuatan politik PKPI di tingkat Provinsi Sumut hingga sampai pada Pemilu 2014 PKPI mampu meraih 3 kursi dari 100 kursi di DPRD Provinsi Sumut (KPU Provinsi Sumut, 2014). Dari telaah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART) PKPI Tahun 2009 yang dipergunakan menjelang Pemilu tahun 2014 diketahui PKPI memiliki struktur organisasi partai dari tingkat pusat hingga tingkat desa/kelurahan. Dari AD ART yang dipergunakan ketika mengikuti kontestasi Pemilu tahun 2014 belum terlihat adanya lembaga otonom maupun organisasi sayap partai yang dibentuk dalam struktur organisasi PKPI. Bentuk struktur organisasi cukup ramping tidak seperti kebanyakan partai lainnya yang telah memiliki badan/lembaga partai maupun organisasi sayap partai ketika menghadapi Pemilu tahun 2014.

Gambar: 4.3.4. Struktur Organisasi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)



Sumber: AD ART Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Tahun 2009

4.3.5. Partai Kebangkitan Bangsa

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) cenderung dikaitkan dengan organisasi Islam bernama Nahdathul Ulama (NU). Kecenderungan itu muncul ketika tampak banyak dari pemimpin NU hadir dalam acara deklarasi PKB tanggal 23 Juli 1998

di rumah Gus Dur (Ambardi, 2009: 143). Nusantara, Putra, & Sudarmanto (1999: 9) mencatat Gus Dur mengungkapkan NU yang membentuk sekaligus menyokong PKB. Secara spesifik Choirie (2007: 186) menyebutkan nama kyai besar NU yang turut mendeklarasikan PKB di Ciganjur Jakarta yaitu: K.H. Abdurrahman Wahid (domisili Jakarta), K.H. Muchit Muzadi (domisili Jember), K.H. Mustofa Bisri (domisili Rembang), K.H. Ilyas Ruchiyat (domisili Tasikmalaya) dan K.H. Munasir Ali (domisili Mojokerto).

Ratnawati (2008: 72) mengungkapkan secara ideologis PKB berdiri dalam ideologi islam yang diartikulasikan dengan prinsip moderat dan terbuka. Latif (2007: 145) menyebut PKB partai yang menghormati nilai-nilai multikultural Indonesia dengan memelihara nilai-nilai lama yang baik dan mengakomodasi nilai-nilai baru yang lebih baik sebagaimana pandangan *ahlusunnah wal jama'ah* (*aswaja*) yang menjadi karakter ulama-ulama NU. Pasca berakhirnya rejim Orde Baru di tahun 1998 Indonesia melakukan konsolidasi untuk mengembangkan Indonesia yang demokratis. Melalui sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia tahun 1999 mengangkat Gus Dur sebagai Presiden dan Megawati sebagai wakil Presiden ke 4 Indonesia yang sebelumnya jabatan Presiden di jabat B.J. Habibie. Macdonald (2013: 155) dalam disertasinya menyatakan ketegangan hubungan Gus Dur dengan partai oposisi dan militer ketika itu menyebabkan Gus Dur di *impeachment* mundur dari jabatan Presiden di bulan Juli 2001 dan jabatan dialihkan ke Megawati sampai masa jabatan habis.

Bila ditelaah dari proses kemunculan PKB sebagai partai memang tidak mungkin untuk menepis PKB sebagai bagian dari NU terlebih lagi ketika saat

PKB dideklarasikan terdapat beberapa Kyai besar NU yang hadir atau dengan bahasa lain disebutkan oleh Tim Kompas (2004: 225) PKB sebagai “anak kandung” dari NU. Bila asumsi ini benar adanya maka semestinyalah PKB selalu meraih dukungan warga NU dalam kontestasi politik elektoral di Pemilu. Namun dalam kenyataan pilihan politik warga NU tersebar ke sejumlah partai yang memiliki “corak” ke NU-an, corak tersebut dapat berupa adanya sejumlah kader NU yang telah menjadi kader partai di sejumlah partai politik seperti dalam PPP, PBB dan lain-lain.

PKB pernah mengalami konflik di internal partai Haboddin (2011: 85) menjelaskan konflik di PKB muncul disaat sebelum dan setelah Gus Dur menjadi Presiden. Diantara bentuk konflik yang terjadi di PKB seperti sekitar tahun 2001 yang melibatkan antara Gus Dur dengan Matori Abdul Djalil yang akhirnya Matori dipecat sebagai Ketua Umum PKB, konflik Gus Dur dengan Alwi Shihab di sekitar tahun 2005 dan sekitar tahun 2008 terjadi konflik antara Yenny Wahid dengan Muhaimin Iskandar (lihat Firmanzah, 2010: 130-131) yang puncaknya diketahui oleh publik luas ketika Yenny Wahid dan Muhaimin Iskandar berlomba mengambil nomor urut partai sewaktu pemilu tahun 2009¹⁷.

Meminjam data KPU tahun 2014 terhadap hasil Pemilu di tahun 1999 secara nasional PKB meraih 12.60% suara secara nasional atau memperoleh 51 kursi di DPR (KPU, 1999). Pemilu 1999 sebagai Pemilu pertama bagi PKB, PKB mampu melakukan kontestasi yang sangat baik ditengah-tengah cukup banyak partai politik berbasis masa Islam yang turut serta sebagai peserta Pemilu tahun

¹⁷ Dikutip dari <https://nasional.sindonews.com/read/739354/12/pengamat-sejarah-muhaimin-yenny-yang-kelam-1366248045>, akses 15 Februari 2017, pukul. 22: 45 WIB).

1999 seperti PPP, PBB, PKB, PNU, PPIM, PSII, PKU sehingga Pemilu 1999 menempatkan PKB sebagai partai dengan peringkat ke 4 perolehan kursi (lihat Harjanto, 2010: 103).

Perolehan kursi PKB sebagai partai baru tidak berbeda begitu jauh dengan PPP sebagai partai tertua yang memperoleh 59 kursi (KPU, 1999). Kegemilangan PKB di Pemilu nasional tahun 1999 memungkinkan sekali dipengaruhi faktor sosok Gus Dur dan kebijakan yang dilakukan Gus Dur sebagai Presiden di tahun 1999 dalam menanta Indonesia menuju demokrasi. Pemilu 2004 PKB mendapat 10.61 % suara atau 52 kursi di DPR. Pemilu 2009 sebanyak 4,94 % atau 28 kursi dan pada Pemilu 2014 PKB memperoleh 47 kursi dengan jumlah suara 9.04% suara secara nasional. Pemilu ini menempatkan PKB sebagai partai peringkat ke 5 dari 12 partai politik peserta Pemilu.

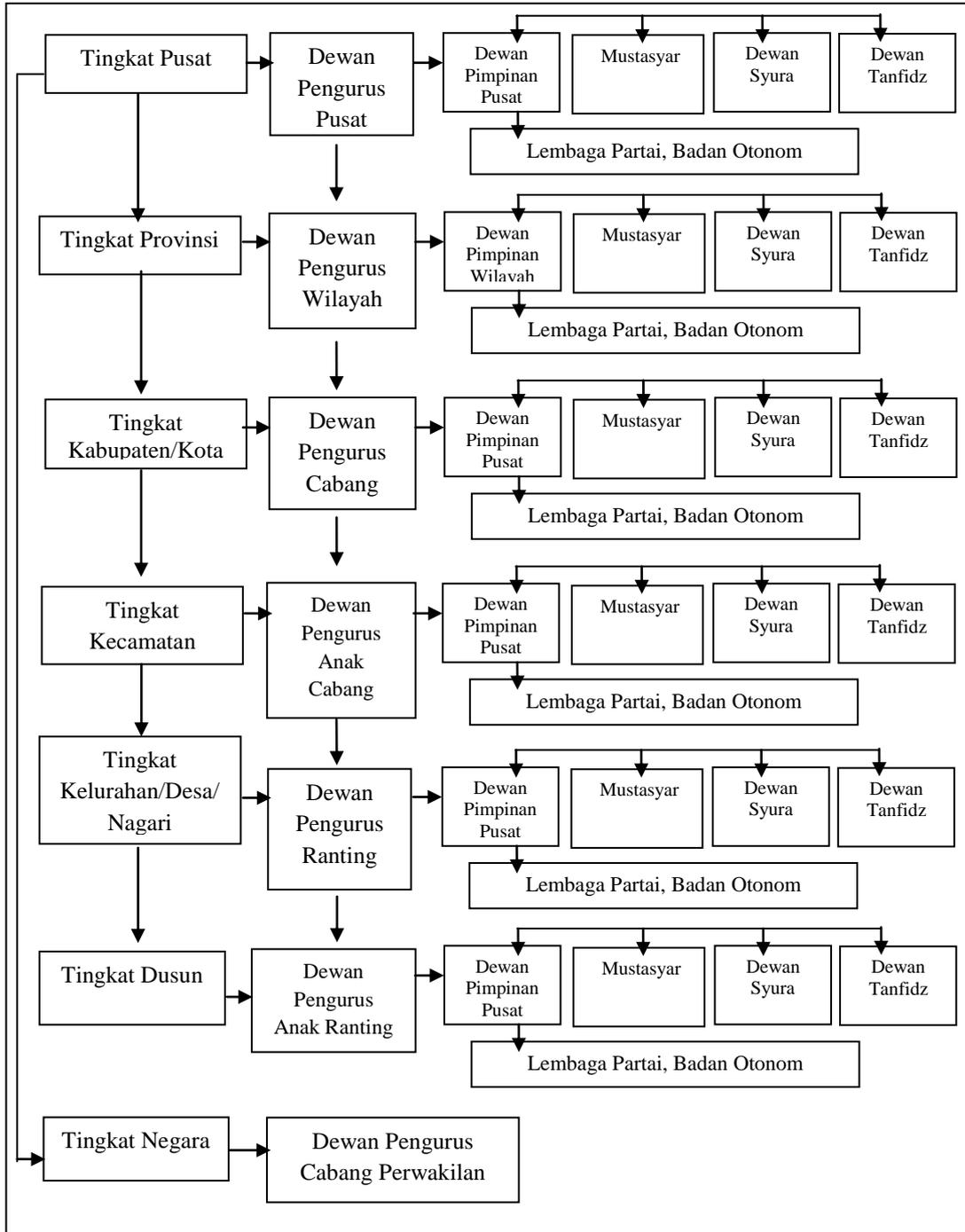
Dalam lingkup Provinsi Sumut pada Pemilu anggota DPRD tahun 1999 PKB memperoleh 1 kursi, Pemilu tahun 2004 tidak memperoleh kursi, Pemilu tahun 2009 PKB mendapatkan 1 kursi dan kemudian pada Pemilu 2014 PKB mendapatkan 3 kursi di DPRD Sumut dalam Pemilu ini posisi kekuatan politik PKB di DPRD Sumut berdasarkan jumlah kursi berada pada peringkat ke 10 dari total 12 partai politik peserta Pemilu di tahun 2014. Menariknya pada Pemilu tahun 2014 untuk pertama kalinya PKB mencalonkan Caleg dari etnis Tionghoa dalam kontestasi Pemilu anggota DPRD Provinsi Sumut. Dari data daftar calon tetap (DCT) anggota DPRD Provinsi Sumut tahun 2014 yang diterbitkan KPU Provinsi Sumut diketahui PKB mengakomodasi keterwakilan etnis Tionghoa dalam daftar calon tetap anggota DPRD Provinsi.

Jumlah Caleg yang diusung PKB berjumlah 1 orang yang bernama Ng Kok Pheng atau alias Suhardy. Pheng berjenis kelamin laki-laki menetap di jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 28 Kelurahan Tebing Tinggi Lama Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi (KPU Provinsi Sumut, 2014). Fenomena kehadiran Caleg seperti Ng Kok Pheng atau alias Suhardy di PKB sepertinya bukan sesuatu yang mengherankan bila mengingat keterbukaan PKB terhadap prinsip multikultural telah membuat PKB terbiasa memaknai perbedaan secara kebangsaan.

Dalam struktur organisasi PKB, Dewan Pengurus Pusat PKB menjalankan organisasi partai berdasarkan kordinasi dari sejumlah badan dalam struktur organisasi PKB seperti Mustasyar, Dewan Syura dan Dewan Tanfidz. Keberadaan struktur Mustasyar, Dewan Syura dan Dewan Tanfidz seperti lembaga eksekutif dan legislatif yang berfungsi sebagai kontrol dan memberikan masukan kepada Dewan Pengurus Pusat PKB dalam menjalankan roda oraganisasi partai.

Struktur organisasi PKB yang terlihat dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART) tahun 2008 terlihat PKB secara organisatoris sudah mapan. Kemapanan ini terlihat dari struktur organisasi PKB yang memiliki jenjang dari pusat hingga ke tingkat dusun dan memiliki lembaga partai serta badan otonom. Kondisi ini yang menimbulkan asumsi kemapanan PKB dalam membentuk struktur organisasi partai yang mengadopsi nilai-nilai Islam dan nilai-nilai demokrasi dalam struktur organisasi partai.

Gambar: 4.3.5. Struktur Organisasi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)



Sumber: Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PKB Tahun 2008.

4.3.6. Partai Demokrat (PD)

Partai Demokrat (PD) lahir tanggal 9 September 2001, tanggal kelahiran PD bersamaan dengan tanggal lahir Susilo Bambang Yudoyono (SBY), Demokrat didirikan oleh SBY dan sejumlah tokoh lainnya seperti Vence (Faizal, 2005: 61-67). PD sebagai partai nasionalis-sekuler (Macdonald, 2013: 156). Sosok SBY sebagai tokoh sentral di PD karena SBY sebagai pendiri PD dan sekaligus menjabat sebagai Dewan Pembina Demokrat. PD pertama kali berpartisipasi sebagai peserta Pemilu di tahun 2004 hasil Pemilu tahun 2004 berhasil mengantarkan PD sebagai partai yang diperhitungkan secara nasional dengan jumlah kursi di DPR sebanyak 55 kursi atau 7.46 % suara secara nasional.

Keadaan ini menempatkan PD sebagai partai baru yang mampu mengambil posisi sebagai partai peringkat ke 4 dari total 24 partai politik peserta Pemilu. Vermonte (2014: 80-81) mengatakan meski PD bukan sebagai pemenang utama dalam Pemilu legislatif tahun 2004 namun PD dengan figgur SBY mampu dengan mudah meraih kemenangan di Pemilu Presiden tahun 2004. Hanan (2012: 13) mencatat PD sebagai partai utama yang mengusung SBY sebagai calon Presiden yang berpasangan dengan Jusuf Kalla (JK) dan berhasil meraih kursi Presiden. Kesuksesan PD dalam Pemilu legislatif dan kemenangan SBY di Pemilu Presiden tahun 2004 tidak terlepas dari peran liputan media yang turut membesarkan nama SBY ketika SBY mengambil posisi mundur dari kabinet menteri era Presiden Megawati.

Keberhasilan PD dalam memperoleh suara di Pemilu tahun 2004 terulang kembali di Pemilu tahun 2009. Pada Pemilu ini PD berhasil meningkatkan posisi

sebagai peringkat ke 1 dengan mendapat 148 kursi di DPR atau 20.81% suara secara nasional sehingga mengalahkan partai “tertua” dan “besar” seperti PDIP, Golkar dan PPP. Tidak lama berselang dari Pemilu legislatif tahun 1999 kemudian di tahun yang sama dilaksanakan Pemilu Presiden. Pemilu Presiden tahun 2009 dimenangkan PD dengan mengusung pasangan SBY dan Budiono. Meski koalisi partai pendukung SBY terbentuk di Pemilu 2004 dan 2009 namun partai utama pengusung SBY berasal dari PD. Pemilu tahun 2014 PD memperoleh 10, 19 persen suara secara nasional dengan meraih 61 kursi di DPR. Penyebab penurunan perolehan suara dan kursi PD di Pemilu 2014 dikarenakan sejumlah oknum elit di PD terlibat kasus hukum dugaan korupsi.

Dalam konteks lokal pada pemilihan anggota DPRD Provinsi Sumut tahun 2004 PD memperoleh 11.76% atau 10 kursi di DPRD Provinsi Sumut dan meningkat menjadi 27 kursi pada Pemilu 2009. Penurunan perolehan kursi PD di DPRD Provinsi Sumut terjadi di Pemilu 2014. Imbas dari sejumlah kasus korupsi yang populer dengan kasus “Hambanlang” sangat besar memberikan pengaruh berpindahannya dukungan para pemilih ke partai lain.

Secara organisasi, PD memiliki struktur organisasi partai yang hampir tidak berbeda dengan partai lainnya. Karena partai bersifat nasional dan menekankan pada kekuatan politik di tingkat bawah maka PD memiliki organisasi sayap partai sebagai “mesin” pendukung aktivitas politik partai di setiap tingkatan. Faizal (2005: 229). mencatat organisasi sayap yang ada dalam PD seperti Angkatan Muda Demokrat, Barisan Muda Demokrat, Gerakan Pemuda Demokrat dan Komite Nasional Pemuda Demokrat.

